



# Belanja Oportunistik Pemerintah Daerah pada Masa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Non-Jawa)

Ar Rozi Abdullah<sup>1,\*</sup>, Payamta Payamta<sup>2</sup>

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

\*(arroziabdullah@student.uns.ac.id)

## Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
19 Desember 2020

Tanggal diterima:  
5 Mei 2021

Tanggal dipublikasi daring:  
25 Juni 2021

**Kata kunci:** belanja oportunistik; pemilihan kepala daerah; petahana

## Pengutipan:

Abdullah, Ar Rozi & Payamta, Payamta. (2021). Belanja Oportunistik Pemerintah Daerah pada Masa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Non-Jawa). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, Vol. 6, No. 1, Hal: 46-65.

**Keywords:** head region elections; incumbents; opportunistic spending

## ABSTRAK

Artikel ini menganalisa perilaku oportunistik belanja pemerintah daerah pada masa pemilihan kepala daerah non-Jawa di Indonesia yang memiliki variabilitas kinerja keuangan daerah. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku oportunistik belanja daerah berkaitan erat dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan keberadaan petahana yang mencalonkan diri dalam pemilihan. Pengujian pengaruh pemilihan dan keberadaan petahana dalam pemilihan terhadap belanja pemerintah daerah menggunakan seperangkat data panel selama periode 2015-2018. Sebanyak 858 unit observasi diuji, yang terdiri dari faktor politik dan keuangan setahun sebelum pemilihan, tahun pemilihan, dan setahun pasca pemilihan dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengujian regresi ditemukan bukti bahwa belanja pemerintah daerah non-Jawa oportunistik seputar pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan peningkatan pada Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan yang merupakan belanja diskresioner. Bukti ini mengonfirmasi beberapa penelitian sebelumnya tentang perilaku belanja yang oportunistik seputar pemilihan kepala daerah.

## ABSTRACT

*This article analyses opportunistic behaviour of local government spending in period the elections for non-Javanese local heads in Indonesia which have variability in financial performance. Previous studies have shown that the opportunistic behaviour of regional spending is closely related to the holding of local head elections and the presence of incumbents running for reelections. The effect of election and the existence of incumbents in elections on local government spending is tested using a set of panel data for the 2015-2018 period. A total of 858 observation units were tested, consisting of political and financial factors in the pre-election year, election year, and post-election year. Based on the results of regression testing, it is found that evidence of non-Javanese local government spending is opportunistic around local head elections. This condition is indicated by the increase in Grant and Financial Assistance Expenditures, which are discretionary spending. This evidence confirms some previous research on opportunistic spending behaviour around local head elections.*

## **PENDAHULUAN**

Terbitnya Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memulai peran yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Pemda mendapatkan otonomi untuk menentukan nasibnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, tak terkecuali pengelolaan keuangan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin lebih didengar aspirasinya, sekaligus tantangan bagi pemda untuk mengoptimalkan potensi sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Entitas publik di daerah merupakan objek yang mendapat banyak sorotan dan menarik untuk diteliti. Hal ini tak lepas dari peran entitas publik yang berkaitan dengan banyak stake holder. Salah satu isu yang menjadi perhatian yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat beberapa unsur yang ada dalam APBD, seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penelitian ini fokus pada belanja pemda. Belanja pemerintah menjadi isu yang penting untuk dilakukan pengkajian, kontrol dan evaluasi

berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Penelitian mengenai belanja pemda sering dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Salah satu peristiwa yang dikaitkan dalam penelitian mengenai belanja yaitu pemilihan kepala daerah. Bukti empiris dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor politik memiliki keterkaitan dengan meningkatnya belanja pemda di Indonesia (Winoto & Falikhatun, 2015). Politisi juga dianggap memanfaatkan APBD dalam pencalonan menjadi kepala daerah (Ritonga & Alam, 2010), bahkan terjadi siklus peningkatan anggaran seputar pemilihan kepala daerah (Arifin & Purnomowati, 2017; Priyono & Wagner, 2018; Setiawan & Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013). Peningkatan belanja pemda ditemukan pada beberapa jenis belanja yang bersifat diskresioner. Bukti empiris serupa juga ditemukan pada penelitian anggaran dan belanja di beberapa negara, seperti Spanyol (Benito et al., 2017), Itali (Repetto, 2018), dan di Brazil (Sakurai & Menezes-Filho, 2011).

Berdasarkan beberapa bukti di atas, anggaran dan belanja menjadi nampak oportunistik. Perilaku oportunistik politisi merupakan sebuah moral hazard karena

dilakukan semata-mata demi keuntungan pribadi. Politisi dianggap mengambil keuntungan untuk keperluan pribadi dengan kedudukannya sebagai penguasa di daerah. Perilaku tersebut terjadi seputar kontestasi pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan lima tahunan, terutama dilakukan oleh petahana. Fenomena ini sudah dijelaskan oleh Nordhaus (1975) bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya dan berusaha membuat citra baik pemerintahan dengan kebijakannya demi mendapat keuntungan elektoral. Petahana juga memanfaatkan kondisi informasi asimetri untuk menutupi informasi yang merugikan dan hanya mempublikasi informasi yang menguntungkan (Rogoff & Sibert, 1986).

Penelitian ini menggunakan data seputar pemilihan kepala daerah tingkat II di Indonesia. Pemilihan yang digunakan merupakan pemilihan serentak dimulai tahun 2015 dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Penelitian ini menggunakan seperangkat data panel seputar pemilihan kepala daerah secara serentak. Momen pemilihan kepala daerah secara serentak digunakan agar dapat menangkap fenomena dalam satu periode waktu

tertentu dengan lebih banyak objek yang diteliti dan diharapkan akan memberikan hasil yang lebih reliabel.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pemilihan dan eksistensi petahana terhadap pengeluaran belanja pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya memperhitungkan eksistensi petahana bupati/walikota. Eksistensi petahana wakil bupati/walikota yang jumlahnya cukup banyak perlu untuk diperhitungkan. Fakta lapangan yang berhasil dikumpulkan menunjukkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 tercatat ada 105 dari 260 pemilihan yang terdapat keikutsertaan wakil bupati/ walikota, sedangkan kandidat petahana bupati/walikota dalam pemilihan sebanyak 148. Penelitian ini juga menggunakan data terbaru pada seputaran pemilihan kepala daerah serentak 2015 dan 2017. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menggunakan tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Priyono & Sastiono, 2019; Priyono & Wagner, 2018; Winoto & Falikhatun, 2015) atau pada tahun pemilihan dengan tambahan satu atau beberapa periode sebelum pemilihan dilaksanakan (Arifin & Purnomowati, 2017; Setiawan & Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013).

Selain beberapa perbedaan di atas, penelitian ini juga mencoba melihat fenomena belanja oportunistik dari sudut pandang berbeda dengan menggunakan sampel pemda non-Jawa. Pengambilan sampel non-Jawa memperhitungkan perolehan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Masih banyak pemda di luar Pulau Jawa yang laporan keuangannya belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan mayoritas pemda di Jawa memperoleh opini WTP (lihat pada Tabel 3). Tujuan pengambilan sampel dengan kriteria tersebut yaitu untuk melihat pengaruh pemilihan dan eksistensi petahana terhadap pengeluaran belanja pemda pada daerah yang memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang heterogen.

## **TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Belanja Oportunistik**

Belanja berarti segala kewajiban yang diakui mengurangi nilai kekayaan bersih pada suatu periode anggaran pemerintah daerah (Pemerintah Indonesia, 2019: 3). Belanja merupakan salah satu unsur penyusun laporan keuangan di pemerintah, selain pendapatan dan

pembiayaan. Belanja daerah ditetapkan dalam APBD yang disusun dan diajukan oleh eksekutif lalu dibahas dan disahkan bersama legislatif untuk satu periode. Belanja dalam APBD menunjukkan rencana pengeluaran selama satu periode.

Setiap pemda dapat memiliki program kerja yang berbeda, sehingga jenis dan besaran pengeluaran dapat bervariasi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Ini merupakan realisasi dari asas otonomi daerah yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Republik Indonesia, 1945: 18). Pemasukan dan pengeluaran pemda selama satu periode anggaran dilaporkan dalam LKPD. Realisasi pengeluaran pemda selama satu periode anggaran tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada LKPD.

Beberapa penelitian di Indonesia menemukan bukti pengeluaran belanja pemda antar periode membentuk suatu pola. Pola belanja pemda terbukti oportunistik pada seputar periode pemilihan kepala daerah (Setiawan & Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013). Winoto & Falikhatun (2015) juga menemukan gejala serupa mengenai keterkaitan faktor politik. Pengujian dilakukan dengan mengategorikan keberadaan petahana terhadap belanja

**Tabel 1. Literatur Belanja Oportunistik**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Temuan</b>
1.	Sjahir et al. (2013)	Political Budget Cycles in Indonesia at The District Level	Pemilihan berpengaruh positif dan signifikan pada belanja kategori lain-lain pada pemilihan langsung; Pengaruh pemilihan lebih kuat jika terdapat petahana yang mencalonkan diri dalam pemilihan.
2.	Winoto & Falikhatun (2015)	Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015	Tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi belanja hibah dan bantuan sosial sebelum dan menjelang Pemilukada 2015; Kemampuan keuangan daerah berpengaruh signifikan pada proporsi alokasi Discretionary Fund (Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) menjelang Pemilukada 2015; Faktor politik (petahana/non-petahana) berpengaruh signifikan pada proporsi alokasi Discretionary Fund (Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) menjelang Pemilukada 2015.
3.	Setiawan & Rizkiah (2017)	Political Budget Cycles in Municipalities: Evidence from Indonesia	Pemilihan berpengaruh negatif dan signifikan pada neraca anggaran; Pemilihan berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Total, Hibah, dan Bantuan Keuangan; Pemilihan berpengaruh negatif dan signifikan pada Belanja Bantuan Sosial; Lama menjabat berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Total.
4.	Arifin & Purnomowati (2017)	Government Expenditure, Political Cycle & Rent-Seeking	Pada tahun-tahun menjelang pemilihan terjadi peningkatan signifikan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada pemerintah daerah di Indonesia.
5.	Priyono & Wagner (2018)	Political Budget Cycles at Subnational Level: Evidence from The Indonesian Simultaneous Regional Election in 2015	Pemilihan berpengaruh positif dan signifikan pada belanja pemerintah daerah, terutama kategori Belanja Diskresioner; Petahana berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Hibah; Belanja Total, Belanja Investasi, dan Belanja Diskresioner (agregat Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan) mengalami peningkatan menjelang dan pada tahun pemilihan;
6.	Sakurai & Menezes-Filho (2011)	Opportunistic and Partisan Election Cycles in Brazil: New Evidence at The Municipal Level	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemilihan terhadap pengeluaran belanja pemerintah daerah di Brazil.
7.	Castro &	Are There Political	Pada tahun pemilihan terjadi

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Temuan</b>
	Martins (2016)	Cycles Hidden inside Government Expenditures?	peningkatan yang signifikan pada jenis pengeluaran belanja umum publik dan kesehatan dibandingkan jenis belanja lain pada pemerintah daerah di Portugal.
8.	Benito et al. (2017)	The Electoral Budget Cycle on Municipal Waste Collection Expenditure	Terjadi peningkatan belanja kebersihan kota pada tahun sebelum pelaksanaan pemilihan pada pemerintah daerah di Spanyol.

diskresioner pemerintah daerah menjelang pemilihan. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa keberadaan petahana mempengaruhi besaran alokasi belanja diskresioner menjelang pemilihan di tahun 2015. Hasil tersebut senada dengan penelitian yang lebih lama bahwa petahana memanfaatkan APBD dalam rangka pencalonan menjadi kepala daerah (Ritonga & Alam, 2010).

Kecenderungan pola peningkatan terjadi pada beberapa pos belanja, terutama yang bersifat diskresioner pada periode seputar pemilihan. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemilihan berpengaruh positif dan signifikan pada realisasi total belanja pemda dan pada belanja kategori diskresioner, seperti Hibah dan Bantuan Keuangan (Priyono & Wagner, 2018; Setiawan & Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013).

Bukti mengenai perilaku oportunistik politisi seputar periode pemilihan tidak hanya ditemukan di Indonesia. Di beberapa negara Eropa dan Amerika juga ditemukan bukti empiris terjadinya perilaku oportunistik politisi. Di Portugal, Castro & Martins (2016) menemukan bukti terjadinya peningkatan pengeluaran belanja umum publik dan kesehatan. Meningkatnya beberapa jenis pengeluaran tersebut terkait dengan pelaksanaan pemilihan.

Benito et al., (2017) meneliti tentang belanja oportunistik yang berkaitan dengan pengeluaran belanja kebersihan kota-kota di Spanyol. Hasil pengujian terhadap data yang diperoleh menunjukkan terjadinya peningkatan belanja kebersihan kota pada tahun sebelum pelaksanaan pemilihan. Sebaliknya, pada tahun pemilihan dan setahun setelahnya jenis belanja tersebut berkurang. Hal

ini diduga kuat dilakukan oleh petahana untuk meningkatkan elektabilitas dengan membentuk pandangan publik tentang kepala daerah yang peduli lingkungan. Sakurai & Menezes-Filho (2011) juga menemukan pengaruh positif dan signifikan pemilihan pada belanja pemerintah daerah di Brazil.

### **Pemilihan (*Elections*)**

Di Indonesia, pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai sejak terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah setelah selama 25 tahun pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sempat akan dihapuskan melalui UU No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Perubahan tersebut menyulut berbagai penolakan dan memaksa pemerintah pada saat itu untuk menerbitkan Perppu. Sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak. Pemilihan kepala daerah serentak mulai dilaksanakan tahun 2015.

Winoto & Falikhatun (2015) tidak menemukan bukti empiris atas dugaan terjadinya penyalahgunaan penggunaan belanja diskresioner dalam rangka pemilihan. Berbeda dengan temuan tersebut, studi lain

pada seputaran pemilihan ditemukan beberapa bukti terjadinya perilaku oportunistik dalam APBD dan terjadi defisit anggaran (Chortareas et al., 2016; Sakurai & Menezes-Filho, 2011; Setiawan & Rizkiah, 2017). Kecenderungan peningkatan belanja ditemukan pada periode prapemilihan (Benito et al., 2017), periode pelaksanaan pemilihan (Ritonga & Alam, 2010; Sakurai & Menezes-Filho, 2011), atau pada keduanya (Arifin & Purnomowati, 2017; Habibi & Suswanta, 2019; Setiawan & Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013).

Penelitian ini menguji pengaruh pemilihan pada belanja pemerintah daerah dengan mengamati periode seputar pelaksanaan pemilihan. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada prapemilihan (t-1), saat pemilihan (t), dan pascapemilihan (t+1) seperti yang digunakan oleh Benito et al., (2017) dan Foucault et al., (2008).

Pada studi lain, periode pengamatan yang digunakan hanya pada tahun pelaksanaan saja (t) (Castro & Martins, 2016; Priyono & Wagner, 2018), tahun pemilihan (t) dan setahun sebelumnya (t-1) (Veiga & Veiga, 2007), dan ada yang menggunakan tahun pemilihan (t) dan dua tahun sebelumnya (t-1, t-2) (Arifin & Purnomowati, 2017; Priyono &

Sastiono, 2019; Setiawan & Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013).

Berdasarkan beberapa bukti di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>1</sub>: Pemilihan berpengaruh positif dan signifikan pada belanja pemerintah daerah

### **Petahana (*Incumbents*)**

Beberapa pemilihan kepala daerah di Indonesia diikuti kandidat petahana. Bupati/walikota yang menjabat dapat ikut serta dalam pemilihan untuk dipilih sebagai kepala daerah yang sama pada kesempatan kedua (Pemerintah Indonesia, 2016: 1). Bupati/walikota petahana yang maju kembali dalam pemilihan tahun 2015 dan 2017 (lihat pada Tabel 2) masing-masing sejumlah 148 dan 60 orang. Jumlah tersebut melebihi separuh dari pelaksanaan pemilihan pada masing-masing tahun.

Eksistensi petahana dalam perebutan jabatan nomor satu di daerah menjadikan pemilihan kepala daerah semakin menarik. Persaingan antara petahana dan kandidat baru bupati/walikota tidak berimbang. Petahana dianggap memiliki keunggulan dengan sebab keberadaan mereka dalam struktural pemerintah daerah, meskipun dalam praktiknya petahana yang mencalonkan diri harus mengambil cuti menjelang pemilihan. Petahana jelas lebih

dikenal masyarakat dibanding kandidat kepala daerah yang baru. Mereka dapat menjalankan program kerja yang bertujuan mendapatkan image baik dalam rangka meningkatkan kemungkinan terpilih kembali dalam pemilihan.

Selain bupati/walikota petahana, terdapat pula wakil bupati/walikota petahana yang ikut meramaikan pemilihan kepala daerah. Wakil bupati/walikota petahana ada yang maju bersama bupati/walikota dan ada pula yang maju bersama calon lain. Pada Tabel 2 disajikan jumlah wakil bupati/walikota yang maju tidak bersama bupati walikota petahana. Diantara mereka ada yang maju kembali sebagai wakil atau ada pula sebagai bupati/walikota. Keikutsertaan wakil petahana menjadikan persaingan dalam pemilihan kepala daerah semakin ketat karena bisa terdapat dua petahana, bupati/walikota dengan wakilnya, dalam suatu pemilihan meskipun terkadang ada kandidat non-petahana. Pada penelitian ini akan dibahas pula pengaruh wakil petahana terhadap belanja pemma pada seputar pemilihan kepala daerah.

Petahana yang mencalonkan diri pada pemilihan untuk kedua kalinya dianggap penyebab belanja



**Tabel 2. Jumlah Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 dan 2017**

	2015		2017	
	Jumlah Pilkada	Petahana	Jumlah Pilkada	Petahana
Bupati/walikota	260	148	94	60
Wakil bupati/walikota*	260	105	94	36

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

\*Wakil bupati petahana maju dalam pilkada tidak bersama bupati petahana

pemerintah daerah menjadi oportunistik. Petahana dianggap memanfaatkan APBD dengan melakukan belanja yang lebih besar terutama pada tahun pemilihan (Habibi & Suswanta, 2019; Ritonga & Alam, 2010).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdapat dua hipotesis yang diajukan tentang pengaruh petahana pada belanja. Hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>2a</sub>: Petahana bupati/walikota berpengaruh positif dan signifikan pada belanja pemerintah daerah.

H<sub>2b</sub>: Petahana wakil bupati/walikota berpengaruh positif dan signifikan pada belanja pemerintah daerah.

## METODE

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini kuat kaitannya dengan faktor politik dan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat II di Indonesia. Sampel yang digunakan yaitu pemerintah daerah tingkat II

non-jawa. Pemerintah daerah di luar jawa banyak yang belum mendapat opini audit WTP atas LKPD (lihat Tabel 3). Perolehan opini WTP merefleksikan entitas sektor publik yang bersih dari korupsi (Rahayu & Fidiana, 2018). Hal ini juga dapat diartikan jika perolehan opini audit selain WTP dapat merefleksikan, paling tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga mempengaruhi penyajian laporan keuangan sampai indikasi terjadinya korupsi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan sampel pada daerah non-Jawa yang masih memiliki variasi opini non-WTP yang cukup banyak untuk melihat perilaku belanja pemda oportunistik.

Data dalam penelitian ini berupa pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Selain data berupa pengeluaran belanja pemerintah daerah, penelitian ini juga menggunakan data penyelenggaraan pemilihan dan keberadaan calon petahana pada pemilihan kepala daerah yang didapatkan dari berbagai

**Tabel 3. Perolehan Opini Audit BPK Pemda Jawa dan Non-Jawa**

<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Opini</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jawa	WTP	20	78	96	104	106
	non_WTP	93	35	17	9	7
Non-Jawa	WTP	123	204	249	273	304
	non_WTP	269	191	146	122	91

Sumber: data diolah dari IHPS BPK RI

sumber, seperti website resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), pemerintah daerah, serta sumber lain yang relevan. Pengamatan dilakukan selama tiga tahun selama periode 2014-2018 pada 284 pemerintah daerah non-Jawa yang melaksanakan pilkada serentak 2015 dan 2017. Pada tahun 2015 sejumlah 206 pemerintah daerah yang melaksanakan pemilukada serentak, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 78 pemerintah daerah.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel pada penelitian ini menggunakan beberapa jenis pengeluaran pemerintah sebagai proksi dalam mendeteksi eksistensi belanja oportunistik. Pengeluaran pemerintah yang digunakan yaitu beberapa jenis belanja, yaitu belanja total, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja pemerintah daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang tidak diperoleh kembali pembayarannya, serta mengurangi saldo anggaran

lebih pada periode anggaran terjadinya belanja (PP No. 71 Tahun 2010). Devinisi atas beberapa macam belanja tersebut sebagai berikut:

- 1) *Belanja Total (Total Expenditure)* merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasi, investasi, transfer, dan kebutuhan tak terduga dalam rangka tugasnya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Total dinyatakan dalam Logaritma Natural (ln).
- 2) *Belanja Hibah (Grant Expenditure)* merupakan salah satu elemen dari Belanja Total yang berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (PP No. 12 Tahun 2019: 48). Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah

daerah lain, BUMN/BUMD, badan/lembaga, serta organisasi berbadan hukum. Belanja hibah dinyatakan dalam Logaritma Natural (ln).

3) *Belanja Bantuan Sosial (Social Assistance Expenditure)* merupakan belanja yang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko sosial pada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang diberikan secara selektif (PP No. 12 Tahun 2019: 48). Penyajian Belanja Bantuan Sosial dalam Natural Logaritma (ln).

4) *Belanja Bantuan Keuangan (Financial Assistance Expenditure)* berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 dapat diberikan kepada pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya (kabupaten/kota-provinsi), sesama pemerintah daerah setingkat (antar kabupaten/kota, antar provinsi), maupun tingkat lebih rendah (provinsi - kabupaten/kota, kabupaten/kota - desa). Peruntukan bantuan keuangan dapat ditentukan sesuai kepentingan pemberi atau sesuai kebutuhan penerima. Belanja Bantuan Keuangan

disajikan dalam Logaritma Natural (ln).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) *Tahun Pemilihan (Elections)*.

Tahun pemilihan dikodekan menggunakan variabel dummy. Pada tahun dimana pemilihan kepala daerah dilaksanakan diberi nilai satu dan nilai nol untuk tahun yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah. Sjahrir et al. (2013) dan Setiawan Rizkiah (2017) menambahkan dua tahun prapemilihan dalam pengujian untuk melihat fenomena belanja oportunistik. Penelitian ini menambahkan satu tahun prapemilihan dan pascapemilihan untuk melihat pengaruh pemilihan dalam anggaran pemerintah daerah.

2) *Petahana (Incumbent)* yaitu kepala daerah yang masih menjabat. Kepala daerah yang baru menjabat satu periode dapat mencalonkan kembali untuk menjadi kepala daerah pada periode kedua. Keberadaan petahana pada pemilihan kepala daerah dikodekan dengan variabel dummy yang bernilai satu jika

terdapat kandidat petahana dan nilai nol jika tidak terdapat kandidat petahana. Terdapat dua variabel petahana dalam penelitian ini yaitu petahana 1 (bupati/walikota; inc1) dan petahana 2 (wakil bupati/walikota; inc2). Pembagian ini dilakukan mempertimbangkan jumlah wakil bupati/walikota petahana yang maju dalam pemilihan tidak bersama bupati/walikota petahana, bahkan bersaing dengan bupati/walikotanya.

Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu pendapatan total. Pendapatan merupakan hak yang diterima melalui rekening kas umum daerah dalam bentuk uang atau penerimaan lain yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah dan diakui menjadi penambah ekuitas (PP No. 12 Tahun 2019). Sjahrir et al. (2013) menggunakan pendapatan sebagai salah satu variabel kontrol dengan penyajian logaritma natural (ln) pendapatan total per kapita. Penyajian dalam penelitian ini tidak perkapita seperti Sjahrir et al. (2013), namun disajikan dalam bentuk logaritma natural (ln).

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan seperangkat data panel dengan pemerintah daerah sebagai unit cross section. Pengamatan selama 3 tahun tiap unit observasi, yaitu pada tahun saat dilaksanakan, tahun sebelum, dan sesudah pemilihan kepala daerah, dalam rentang tahun 2014-2018. Penelitian Setiawan dan Rizkiah (2017) dan Sjahrir et al. (2013) menangkap fenomena belanja oportunistik dengan memasukkan dua tahun prapemilihan kepala daerah. Berbeda dengan penelitian keduanya, penelitian ini menggunakan satu tahun sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah untuk melihat fenomena belanja oportunistik seperti yang dilakukan oleh Foucault et al., (2008). Model yang digunakan sebagai berikut:

$$y_{ijt} = \alpha + \gamma \text{elect}_{i(t-1)} + \gamma \text{elect}_{it} + \gamma \text{inc1}_{it} + \gamma \text{inc2}_{it} + \delta X_{it} + e_{ijt}$$

Model di atas menunjukkan variabel dependen  $y_{ijt}$  yang menunjukkan variabel  $j$  pada pemda  $i$  dan tahun  $t$ . Empat macam pengeluaran belanja pemda digunakan sebagai proksi untuk mendeteksi belanja oportunistik, yaitu Belanja Total, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Variabel dummy **elect** memiliki tiga kategori, yaitu

pemilihan ( $t$ ), sebelum ( $t-1$ ), dan sesudah pemilihan ( $t+1$ ). Jumlah variabel dummy yang digunakan adalah jumlah kategori dikurangi 1 ( $k-1$ ), sehingga variabel dummy **elect** berjumlah 2 (**elect<sub>t-1</sub>** dan **elect<sub>t</sub>**) dan **elect<sub>t+1</sub>** menjadi excluded group. Variabel **elect** merupakan dummy yang menunjukkan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada pemda  $i$  pada tahun  $t$ . Variabel **elect<sub>i(t-1)</sub>** pemda  $i$  pada tahun  $t-1$  (setahun sebelum pemilihan).

Faktor petahana dibagi menjadi tiga kategori dummy, yaitu petahana kepala daerah, wakil kepala daerah, dan ketiadaan petahana. Ketidadaan kepala daerah yang ikut serta dalam pemilihan menjadi exclude group. Variabel **inc1<sub>it</sub>** menunjukkan keikutsertaan petahana pada pemda  $i$  di tahun  $t$ . Keikutsertaan petahana wakil kepala daerah  $i$  di tahun  $t$  disimbolkan dengan variabel **inc2<sub>it</sub>**. Pendapatan total disimbolkan dengan **X<sub>it</sub>** merupakan kontrol yang menunjukkan pendapatan pemda  $i$  pada tahun  $t$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan satu set data panel yang diambil pada periode 2014-2018. Beberapa variabel keuangan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam logaritma natural, diantaranya

belanja total, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan pendapatan total. Variabel politik tentang pemilihan dan petahana disajikan dalam variabel dummy. Deskripsi 858 unit yang diobservasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Variabel belanja total (TE) pemda non-Jawa memiliki rata-rata 27.630 dengan skor minimal 25.426 dan maksimal 29.544. Belanja hibah (GE) memiliki rata-rata 23.348 dengan skor minimal 0.000 dan maksimal 26.465. Rata-rata belanja bantuan sosial (SAE) menunjukkan skor 18.958, skor minimal 0.000 dan maksimal 26.689. Variabel dependen terakhir, belanja bantuan keuangan (FAE) memiliki rata-rata 22.746 dengan skor minimal 0.000 dan maksimal 27.746. Variabel GE, SAE, dan FAE terdapat skor 0.000 pada nilai minimal menunjukkan bahwa terdapat pemda yang tidak merealisasikan belanja. Tidak terjadinya realisasi belanja dapat terjadi karena pemda tidak melakukan belanja pada pos tersebut atau dapat juga karena tidak dianggarkan dalam proses penyusunan APBD.

Tahun pemilihan (**elect**), petahana 1 (**inc1**), dan petahana 2 (**inc2**), ketiganya merupakan variabel

**Tabel 4. Statistik Deskriptif**

Variabel		Rata-rata	Standard Dev.	Minimal	Maksimal
Belanja Total*	<b>TE</b>	27.630	0.459	25.426	29.544
Belanja Hibah*	<b>GE</b>	23.348	3.310	0.000	26.465
Belanja Bantuan Sosial*	<b>SAE</b>	18.958	7.629	0.000	26.689
Belanja Bantuan Keuangan*	<b>FAE</b>	22.746	6.315	0.000	27.279
Tahun Pemilihan**	<b>elect</b>	0.333	0.472	0	1
Petahana 1**	<b>inc1</b>	0.190	0.393	0	1
Petahana 2**	<b>inc2</b>	0.135	0.342	0	1
Pendapatan Total*	<b>tr</b>	27.634	0.438	25.560	29.496

Catatan: Jumlah observasi 858 unit; \*dalam logaritma natural (ln) \*\*dummy.

dummy memiliki nilai minimal 0 dan maksimal 1. Tahun pemilihan memiliki rata-rata 0.333 artinya terdapat 33% pemilihan yang dilaksanakan dari 858 unit observasi selama periode 2014-2018. Petahana 1 memiliki rata-rata 0.190 artinya dari 858 unit observasi terdapat 19% petahana bupati/walikota dalam pemilihan yang dilaksanakan antara 2014-2018. Rata-rata variabel petahana 2 sebesar 0.135 menunjukkan terdapat 14% unit observasi yang melaksanakan pemilihan antara tahun 2014-2018 yang terdapat calon petahana wakil bupati/walikota. Variabel pendapatan total (TR) memiliki rata-rata 27.634 dengan skor minimal 25.560 dan maksimal 29.496.

Hasil pengujian regresi pada data panel ditunjukkan pada Tabel 5. Dari hasil uji regresi yang dilakukan dengan metode Fixed Effect, pengaruh

signifikan variabel *elect-1* dan *elect* terjadi pada semua variabel belanja, baik pada belanja total maupun pada masing-masing jenis belanja.

Koefisien regresi menunjukkan terjadi tren peningkatan belanja pada periode pemilihan dibandingkan setahun sebelumnya. Peningkatan belanja terjadi pada belanja total, hibah, dan bantuan keuangan. Belanja total mengalami peningkatan dari -0.015 menjadi 0.022, belanja hibah meningkat dari 0.484 menjadi 1.524, dan belanja bantuan keuangan meningkat dari -1.387 menjadi -0.272. Berbeda dengan ketiga jenis belanja tersebut, bantuan sosial menunjukkan koefisien yang lebih tinggi pada periode sebelum pemilihan dengan nilai koefisien 1.884 menjadi 0.916 pada tahun pemilihan.

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Metode Fixed Effect**

	<b>Belanja Total</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>
	<b>(TE)</b>	<b>(GE)</b>	<b>(SAE)</b>	<b>(FAE)</b>
c	-0.269 (0.197)	-64.033 (0.000)	30.236 (0.000)	-53.922 (0.000)
<b>elect-1</b>	<b>-0.015 (0.000)</b>	<b>0.484 (0.000)</b>	<b>1.884 (0.000)</b>	<b>-1.387 (0.000)</b>
<b>elect</b>	<b>0.022 (0.000)</b>	<b>1.524 (0.000)</b>	<b>0.916 (0.000)</b>	<b>-0.272 (0.018)</b>
<b>inc1</b>	<b>-0.009 (0.000)</b>	<b>-0.582 (0.000)</b>	0.047 (0.748)	-0.109 (0.351)
<b>inc2</b>	<b>-0.019 (0.000)</b>	-0.056 (0.329)	<b>-0.550 (0.000)</b>	-0.116 (0.324)
Tr	1.010 (0.000)	3.142 (0.000)	-0.440 (0.090)	2.796 (0.000)
Jml. Observasi	858	858	858	858
R-squared	0.999	0.927	0.958	0.924
Adj. R-squared	0.998	0.890	0.936	0.884
Prob(F-statistic)	0.000	0.000	0.000	0.000

Catatan: variabel TE, GE, SAE, & FAE dalam logaritma natural; elect-1=setahun sebelum pemilihan (dummy: 1=setahun sebelum pemilihan & 0=lainnya) dan elect=tahun pemilihan (dummy: 1=tahun pemilihan & 0=lainnya); inc1=petahana bupati/walikota dan inc2=petahana wakil bupati/walikota (dummy: 1=petahana & 0=lainnya); tr=pendapatan total (dalam logaritma natural)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat menjadi bukti bahwa belanja pmda pada sekitaran tahun pemilihan oportunistik. Peningkatan beberapa jenis belanja signifikan terjadi pada masa pemilihan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun secara total tidak meningkat drastis, namun dalam dua variabel lain (Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan) peningkatan cukup signifikan. Peningkatan pada keduanya yang tergolong belanja diskresioner mengonfirmasi penelitian terdahulu yang menemukan bukti bahwa kategori belanja ini oportunistik seputar pemilihan (Setiawan & Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013).

Beberapa bukti tersebut juga menunjukkan bahwa politisi cenderung mengambil strategi alokasi anggaran kepada kelompok sosial/unit vertikal dibanding pribadi dan kelompok yang diseleksi. Hal ini diduga untuk mendapatkan efek elektoral yang lebih luas dan dapat dirasakan banyak orang dibandingkan dengan pengeluaran pada Belanja Bantuan Sosial yang penerimanya diseleksi ketat.

Kedua variabel petahana (Inc1 & Inc2) menunjukkan pengaruh yang signifikan pada Belanja Total, namun koefisien menunjukkan arah yang negatif. Variabel inc1 berpengaruh negatif dan signifikan pada Belanja Total dan Belanja Hibah dengan nilai

koefisien masing-masing -0.009 dan -0.582. Variabel *inc1* tidak signifikan mempengaruhi Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan. Serupa dengan hasil yang didapat *inc1*, *inc2* juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Variabel *inc2* mempengaruhi Belanja Total dan Belanja Bantuan Sosial dengan nilai koefisien masing-masing -0.019 dan -0.550. Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan tidak dipengaruhi oleh Variabel *inc2*.

Variabel *petahana* tidak menunjukkan pengaruh yang positif. Meskipun tidak menunjukkan pengaruh positif, koefisien *Inc1* cenderung lebih besar dibanding *Inc2* pada Belanja Total, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa kepala daerah (bupati/walikota) adalah pemilik diskresi sebagai kuasa pengguna anggaran di daerah. Dalam penggunaan anggaran, kepala daerah dapat melakukan diskresinya pada beberapa jenis belanja bahkan sampai terjadi defisit anggaran. Dalam beberapa penelitian penggunaan anggaran, terdapat temuan bukti terjadinya peningkatan defisit seputar pemilihan (Setiawan & Rizkiah, 2017; Veiga & Veiga, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah memanfaatkan belanja daerah demi kepentingan elektoral.

Variabel Pendapatan Total sebagai kontrol menunjukkan pengaruh yang signifikan pada seluruh jenis pengeluaran, baik secara total maupun pada masing-masing jenis pengeluaran. Pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Total terjadi pada Variabel Belanja Total, Hibah, dan Bantuan Keuangan. Hal ini berarti peningkatan penerimaan oleh pemda akan diikuti peningkatan pengeluaran belanja.

#### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

Studi ini dilakukan pada pemda non-Jawa yang memiliki karakteristik perolehan opini LKPD dari BPK yang memiliki variasi dibanding pemda di Jawa. Pengujian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua faktor politik, pemilihan dan *petahana*, pada besaran belanja pemda. Pengujian dilakukan untuk melihat sejauh mana kedua faktor politik tersebut mempengaruhi besaran pengeluaran belanja pemda.

Hasil uji regresi data panel menunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan belanja pemda menjelang tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Temuan ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan adanya pengaruh pemilihan pada pengeluaran belanja pemerintah



(Arifin & Purnomowati, 2017; Setiawan & Rizkiah, 2017). Berdasarkan hasil tersebut, belanja pemda dapat dikatakan oportunistik terkait pemilihan karena terjadi peningkatan seputar pelaksanaan pemilihan.

Selama tahun pemilihan, pengeluaran belanja cenderung dialokasikan pada kelompok atau unit vertikal pemerintahan, dengan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan untuk mendapat keuntungan elektoral lebih luas. Hasil ini senada dengan Arifin & Purnomowati (2017) yang menemukan bukti bahwa politisi menggunakan strategi alokasi anggaran di sekitaran pemilihan kepala daerah. Hal tersebut diduga dilakukan agar tidak terjadi tingginya defisit anggaran pada tahun pelaksanaan pemilihan akibat masifnya belanja.

Berdasarkan pengujian, faktor petahana yang menjadi kandidat dalam pemilihan tidak signifikan pengaruhnya pada belanja. Kedua kategori petahana yang diuji tidak ada yang menunjukkan bukti pengaruh positif pada besaran belanja pemda. Penelitian ini memberi bukti yang berbeda dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa petahana yang bertarung dalam pemilihan

berpengaruh pada pengeluaran belanja pemda (Sjahrir et al., 2013). Petahana memang tidak signifikan berpengaruhnya pada belanja, namun efek petahana kepala daerah ditemukan lebih besar dibanding wakilnya. Hal ini membuktikan bahwa meski wakil merupakan pembantu kepala daerah, bupati/walikota tetaplah pemegang kuasa pengguna anggaran pemda. Bupati/walikota memiliki diskresi untuk mempengaruhi alokasi anggaran di pemerintahan daerah. Diskresi ini bahkan terkadang dipaksakan meskipun kondisi keuangan daerah dalam keadaan tidak sehat (Habibi & Suswanta, 2019).

Penelitian ini memiliki implikasi tentang kinerja keuangan di pemda. Kinerja pemda di luar Jawa masih bervariasi. Masih terdapat pemda yang memiliki kinerja yang kurang baik. Ini dapat dilihat salah satunya dengan indikator kinerja keuangan pemda yaitu perolehan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selain perolehan opini yang masih belum baik, ternyata masih ada masalah lain yaitu kesewenang-wenangan kepala daerah yang memanfaatkan diskresinya pada anggaran pemda untuk kepentingan elektoral. Ini perlu menjadi perhatian pihak berwenang supaya mengawal penggunaan

anggaran di pemda secara intensif untuk menghindari penyalahgunaan wewenang kepala daerah.

Selain bagi pihak berwenang, masyarakat sebagai stakeholder utama seharusnya kritis terhadap segala janji dan pemberian pemangku jabatan yang memiliki kepentingan dalam pemilihan. Pemangku jabatan yang berkepentingan terkadang memanfaatkan belanja pemda dalam rangka pemenangan pemilihan.

Pemilihan kepala daerah serentak antara tahun 2014-2018 menjadi perhatian dalam penelitian ini. Pelaksanaan pemilihan serentak dalam rentang tahun 2014-2018 di Indonesia terjadi dalam tiga gelombang, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2018. Tahun 2018 tidak digunakan sebagai sampel karena penelitian ini menggunakan data pada tahun pemilihan, sebelum, dan sesudah pemilihan. Data keuangan tahun 2019 (pasca pemilihan 2018) belum memungkinkan untuk dikumpulkan pada saat pengambilan data, salah satunya dikarenakan LKPD belum diaudit BPK. Penelitian ini berkaitan sekali dengan perolehan opini audit pemda, khususnya pemda non-Jawa yang menjadi sampel penelitian.

Pengujian pengaruh pemilihan pada pengeluaran belanja pemda tidak memperhitungkan kapan

pemilihan dilaksanakan. Pada tahun 2016 pemilihan terjadi pada akhir tahun atau tepatnya Bulan Desember. Tahun 2017 pemilihan kepada daerah dilaksanakan di awal tahun, Bulan Februari. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan berakhirnya periode pelaporan keuangan pemda. Hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan antara pemda yang melaksanakan pemilihan di awal dan akhir periode berkaitan dengan penerapan periode pemilihan, pra, dan pasca pemilihan.

Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan pengujian dengan mempertimbangkan cut-off periode APBD sesuai waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk melihat kondisi sebenarnya. Jika kurang memungkinkan, penerapan cut-off yang seragam di awal atau akhir tahun anggaran untuk mendapat hasil yang lebih valid dan reliabel.

## **REFERENSI**

- Arifin, T., & Purnomowati, N. H. (2017). Government expenditure, political cycle & rent-seeking. *International Journal of Business and Society*, 18(3), 461–468.
- Benito, B., Guillamón, M. D., & Ríos, A. M. (2017). The electoral budget cycle on municipal waste collection expenditure. *Applied Economics*, 49(41), 4161–4179.

- <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1276278>
- Castro, V., & Martins, R. (2016). Are there political cycles hidden inside government expenditures? *Applied Economics Letters*, 23(1), 34–37.  
<https://doi.org/10.1080/13504851.2015.1047084>
- Chortareas, G., Logothetis, V., & Papandreou, A. A. (2016). Political budget cycles and reelection prospects in Greece's municipalities. *European Journal of Political Economy*, 43, 1–13.  
<https://doi.org/10.1016/j.ejpolec.2016.02.001>
- Foucault, M., Madies, T., & Paty, S. (2008). Public spending interactions and local politics. Empirical evidence from French municipalities. *Public Choice*, 137(1–2), 57–80.  
<https://doi.org/10.1007/s11127-008-9312-z>
- Habibi, M., & Suswanta, S. (2019). Politics Discretionary Fund Budget of Regional Income and Expenditure Before and Election in 2015 in Samarinda City. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(1).  
<https://doi.org/10.18196/jgpp.61106>
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169.  
<https://doi.org/10.2307/2296528>
- Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UMKM. NKRI.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. NKRI.
- Priyono, S. H., & Sastiono, P. (2019). Re-running Eligibility on Fiscal Spending Behavior: Evidence from Indonesian Municipalities. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(1), 143–163.  
<https://doi.org/10.36574/jpp.v3i1.62>
- Priyono, S. H., & Wagner, N. (2018). Political Budget Cycles At Subnational Level: Evidence From The Indonesian Simultaneous Regional Election In 2015. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(3), 203–218.  
<https://doi.org/10.36574/jpp.v2i3.38>
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>
- Repetto, L. (2018). Political Budget Cycles with Informed Voters: Evidence from Italy. *Economic Journal*, 128(616), 3320–3353.  
<https://doi.org/10.1111/econj.12570>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. NKRI.
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 4, 1–25.
- Rogoff, K., & Sibert, A. (1986). Elections and Macroeconomic Policy Cycles. *NBER Working Paper Series 1838*, 1–42.
- Sakurai, S. N., & Menezes-Filho, N. (2011). Opportunistic and partisan election cycles in Brazil: New evidence at the municipal level. *Public Choice*, 148(1–2), 233–247.  
<https://doi.org/10.1007/s11127-010-9654-1>
- Setiawan, D., & Rizkiah, F. (2017). Political budget cycles in municipalities: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 18(3), 533–546.
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345.  
<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>
- Veiga, L. G., & Veiga, F. J. (2007). Political business cycles at the municipal level. *Public Choice*, 131(1–2), 45–64.  
<https://doi.org/10.1007/s11127-006-9104-2>
- Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, vol 11(1), pp 75–91.  
<https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05>